

# Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis

Terakreditasi "B" Nomor: 55/DIKTI/Kep./2005

**Risk dan Return Jakarta Islamic Index (III).**

**Isni Andriana**

**Membangun Kawasan Agropolitan Melalui Pengembangan Perkebunan  
Bahan Baku Biofuel.**

**Supomo**

**Pengembangan Usaha Sektor Informal**

**Nurlina Tarmizi & Sukanto**

**Analisis Pola Konsumsi Rumah Tangga Setengah Pengangguran Kasus  
Guru SDN di Kecamatan Ilir Barat I - Kota Palembang.**

**Neneng Miskiyah**

**Pengaruh Kualitas dan Profesionalisme Terhadap Produktivitas Kerja  
Kajian pada Departemen SDM pada Pertamina, PT. Semen Baturaja,  
PT. Pusri, PT. PLN, dan PTBA.**

**Agustina Hanafi**

Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

JKEB	Vol. 9	No. 1	Halaman 1 - 71	Palembang, Juni 2007	ISSN 1410-8038
------	--------	-------	----------------	----------------------	----------------

## PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL

Nurlina Tarmizi  
Sukanto

### ABSTRACT

*The aim of this article is to analyze the development of an informal sector in the future for slowing down the unemployment. The number of labour that is working in the informal sector is quite large and due to it, there are some agendas is given in the matter of the development and the sustainable for this sector, such as, capital aid, a fixation of working condition, a social cover, a support and governments' help, an entrepreneur organization and labour, an integretion program of informal sector and poverty of urban, sharing and an information networking. Those agendas have a purpose to support the informal sector as one of an institution to slow the unemployment.*

*Keywords : Informal Sector, Labour Absorption, Unemployment*

### ABSTRAK

*Tulisan ini bertujuan menganalisis pengembangan usaha sektor informal di masa datang guna mengerem laju pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang berusaha di sektor informal relatif banyak dan karena itu ada beberapa agenda yang diajukan dalam kaitan pengembangan dan keberlanjutan sektor ini antara lain bantuan permodalan, perbaikan kondisi kerja, perlindungan sosia, dukungan dan peranan pemerintah kota/daerah, organisasi pengusaha dan pekerja, integrasi program sektor informal dan kemiskinan perkotaan, sharing dan networking informasi. Semua agenda ini bertujuan mensupport keberadaan sektor informal sebagai salah satu institusi yang dapat mengerem laju angka pengangguran.*

**Kata-kata Kunci:** Sektor Informal, Penyerapan Tenaga Kerja, Pengangguran

### PENDAHULUAN

Konsep sektor informal diperkenalkan ILO (*International Labour Organization*) lebih dari 25 tahun yang lalu. Laporan diawali oleh situasi yang terjadi di Kenya ([www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf\\_sect.htm](http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf_sect.htm)), dimana pada tahun 1972 banyak penduduk pedesaan yang karena kemiskinan bermigrasi ke daerah perkotaan. Perpindahan ini ternyata menciptakan pengangguran di daerah perkotaan (*urban unemployment*), ketika sektor modern perkotaan tidak dapat menyediakan cukup

kesempatan kerja. Migran dari pedesaan dan juga penduduk perkotaan yang tidak terabsorpsi di sektor modern membentuk usaha-usaha skala kecil/mikro. Usaha ini tidak terorganisir, tidak tercatat dan aktivitasnya tidak teratur (*unregulated*). Usaha ini dinyatakan sebagai usaha sektor informal.

Meskipun tidak terorganisir, sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Dilaporkan juga oleh ILO bahwa 50-60% dari lapangan pekerjaan yang ada di kota-kota di Asia dan Asia Timur merupakan usaha sektor informal. Ini berarti tenaga kerja yang bekerja di sektor ini relatif cukup banyak.

Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor informal terhadap angkatan kerja, khususnya di perkotaan cenderung meningkat. Tahun 1971, proporsi pekerja sektor informal terhadap angkatan kerja sekitar 25 persen, tahun 1990 mencapai 42 persen, Tahun 2000 menjadi 65 persen (Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, [www.google.co.id](http://www.google.co.id)). Pada Tahun 2005, kemampuan sektor ini menyerap tenaga kerja semakin meningkat menjadi 70 persen dari angkatan kerja. Sebagian besar (92%) pekerja di sektor informal adalah sebagai tenaga usaha pertanian, perburuan dan perikanan dan hanya 8% yang berada di sektor formal dengan jenis pekerjaan yang sama. Sementara untuk tenaga penjualan di sektor informal mencapai 83% dibandingkan dengan 17% di sektor formal.

Di sisi lain, kontribusi sektor informal yang diwakili usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) Tahun 2005 mencapai 55,8 persen dan terhadap total ekspor sekitar 19 persen (Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, [www.google.co.id](http://www.google.co.id)).

Pertumbuhan sektor informal yang cukup pesat ini diperkirakan masih akan terus berlanjut. Salah satu argumen logisnya adalah prospek penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang masih suram menyebabkan sektor informal akan tetap eksis. Apalagi bila melihat angka pengangguran yang terus meningkat beberapa tahun terakhir maka keberadaan sektor informal harus terus dikembangkan. Angka pengangguran dari 5,18 juta orang Tahun 1997 meningkat menjadi 6,07 juta orang pada tahun 1998, 8,90 juta orang Tahun 1999, 8,44 juta orang tahun 2000, 8,01 juta orang Tahun 2001, 9,13 juta orang Tahun 2002, 9,53 juta orang Tahun 2003, 10,25 juta orang Tahun 2004 dan 10,9 juta orang Tahun 2005.

Selanjutnya, jika angka setengah penganggur (mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu) dimasukkan maka angka pengangguran saat ini mencapai 40,1 juta orang

atau sekitar 37 persen dari total angkatan kerja (106,9 juta orang).

Dengan mengingat jumlah pekerja yang ter-*absorb* di sektor ini demikian banyak, maka hendaknya menjadi bahan pemikiran bersama bagaimana agar sektor informal dapat untuk terus ditumbuhkembangkan. Tujuan akhir mengembangkan sektor ini adalah mengerem lajunya pengangguran.

Tulisan ini juga mencoba melihat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang terjadi pada sektor informal. Dengan demikian atas dasar analisis tersebut dapat di klasifikasi agenda yang diperlukan untuk memacu dan melindungi perkembangan sektor ini.

## KAJIAN PUSTAKA

Menurut ILO sektor informal terdiri dari ([www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf\\_sect.htm](http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf_sect.htm)) usaha skala kecil, kegiatan-kegiatan *self-employed* (dengan atau tanpa pekerja), mempunyai ciri *low level of organization and technology* dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Lebih spesifik, Cross menyatakan (<http://old.openair.org/cross/infdef2.html>) bahwa aktivitas sektor informal diluar norma-norma yang berlaku di sektor formal tetapi sektor informal bukan sektor ilegal. Sektor informal adalah sektor usaha kecil/mikro dengan bekerja sendiri atau berusaha dibantu anggota keluarga sedangkan konsep sektor formal adalah berusaha dibantu buruh tetap dan buruh karyawan.

Adapun karakteristik sektor informal menurut ILO adalah: (a) pekerja kurang dari 10 orang dan sebagian besar pekerja adalah keluarga sendiri, (b) bidang usaha heterogen dimana aktivitas utama adalah pedagang eceran, transportasi, bengkel, konstruksi, jasa-jasa personal dan manufacturing, (c) pekerja mudah keluar-masuk dibandingkan sektor formal, (d) investasi minimal, e) bersifat labor intensif dan

tidak diperlukan pekerja dengan skill tinggi, (f) hubungan *employer-employee* sifatnya informal dan tidak terlindungi oleh peraturan, (g) pekerja dapat mengerjakan kegiatan secara bersama-sama.

Selain itu sektor informal juga memiliki karakteristik seperti: jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, kurangnya akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal (Widodo dalam [Http://paue.ugm.ac.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=55&itemid=2](http://paue.ugm.ac.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=55&itemid=2)).

Karena karakteristik yang demikian, kegiatan sektor ini selalu dianggap sebagai kegiatan ekonomi marjinal. Sebagai bukti, sektor informal bukan merupakan pilihan pertama bagi para pencari kerja; mereka yang mencari kerja pertama kali akan menyerbu sektor-sektor formal. Sektor ini akan dilirik pencari kerja ketika mereka tidak dapat masuk ke sektor formal.

Meskipun demikian, sektor informal telah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis ekonomi pada Tahun 1997 yang lalu. Sektor informal berperan sebagai penyelamat dari bertambah banyaknya barisan pengangguran, yang menurut ILO (dalam Cross, <http://old.openair.org/cross/infdet2.html>), sektor ini merupakan *potential solution* dari pengangguran di Negara Sedang Berkembang. Mereka yang ter-PHK dari sektor formal beralih dan masuk ke sektor informal.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Sektor Informal di Indonesia

Di Indonesia, sektor informal menunjukkan ketangguhan dan menjadi peredam (*buffer*) gejolak di pasar kerja dimana sektor ini mampu menampung limpahan (*over supply*)

jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan relatif dapat teratasi.

Pasca krisis, sektor ini kembali menjadi "idola" para pekerja kelas bawah sehingga mampu menjadi katup pengaman ditengah ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja. Sektor informal sepanjang periode 1998 sampai Februari 2007 menunjukkan trend yang positif.

Dengan menggunakan konsep berusaha sendiri atau berusaha dibantu anggota keluarga merupakan sektor informal sedangkan berusaha dibantu buruh tetap dan buruh karyawan adalah sektor formal maka kemampuan kedua sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 1. Temyata terdapat perbedaan kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan antara kedua sektor tersebut dengan perbandingan sebagai berikut. Tahun 1998, 65,40 persen di sektor informal dan 34,60 persen di sektor formal; Tahun 2006: 68,92 persen di sektor informal dan 31,08 persen di sektor formal. Februari 2007: 69,56 persen di sektor informal dan 30,45 di sektor formal.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kedua sektor ini mengalami pertumbuhan yang berbeda. Sektor informal mengalami pertumbuhan yang positif sepanjang periode 1998-2006 yakni sebesar 0,88 persen sedangkan sektor formal justru mengalami pertumbuhan negatif (-1,77 persen). Fenomena ini disebabkan stagnannya lowongan pekerjaan di sektor formal.

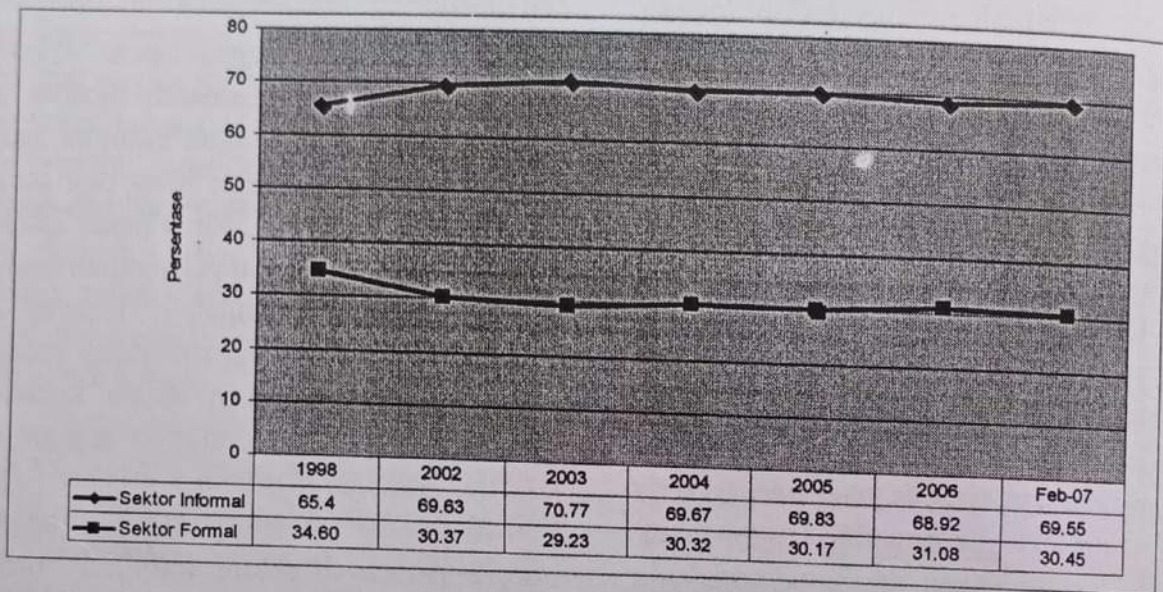
Secara terinci status pekerjaan yang mendominasi sektor informal pada Tahun 1998 adalah berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (23,41 persen), berusaha dengan bantu anggota keluarga (22,46 persen) sedangkan persentase pekerja keluarga relatif kecil (19,53 persen). Namun, tahun 2002 sampai Februari 2007 status pekerjaan sebagai pekerja keluarga lebih dominan dibanding yang lain. Data Februari Tahun 2007 menunjukkan bahwa yang

bekerja sebagai pekerja keluarga meningkat sehingga mencapai 29,05 persen sedangkan yang berusaha sendiri menurun dibanding kondisi Tahun 1998 yaitu 19,13 persen (lihat Gambar 2).

Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri setelah Tahun 1998 menurun. Diantara banyak faktor menjadi penyebab, faktor ke-

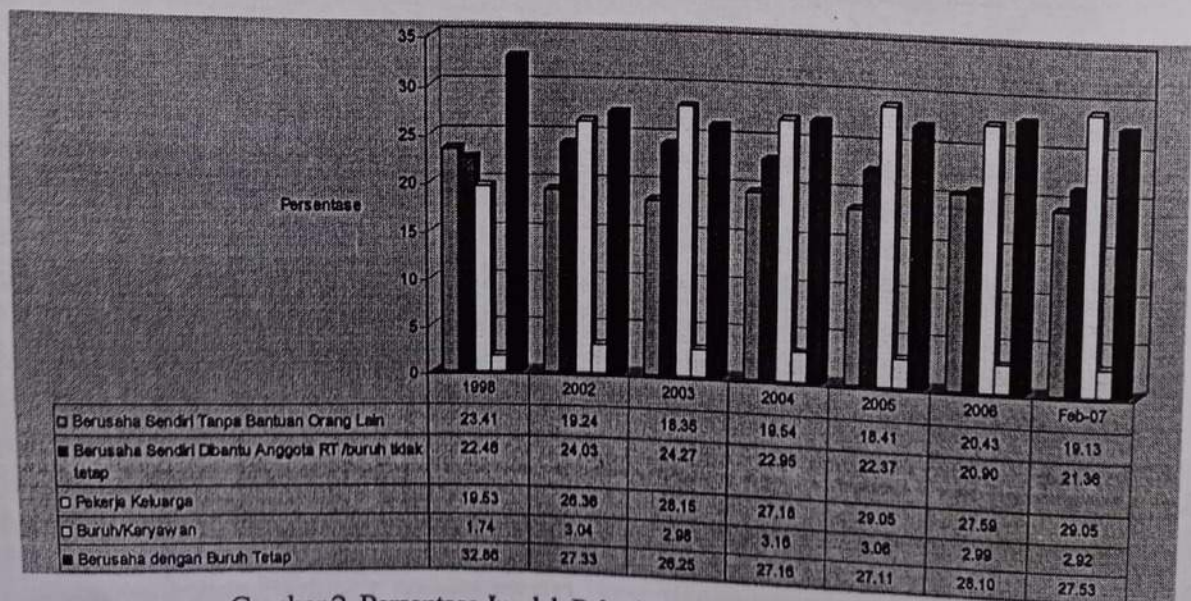
kurangan modal diduga menjadi penyebab utama.

Sektor informal terkait dengan sektor pedesaan hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian informal dalam menyerap tenaga kerja. Pekerja sektor informal pertanian Tahun 1998 sebesar 85,61 persen, diikuti perdagangan, hotel dan restoran: 82,98 persen.



Gambar 1. Persentase Jumlah Pekerja Sektor Informal dan Formal 1998 – Februari 2007

Sumber: dikutip dari <http://web.bappenas.go.id> dan Statistik Indonesia berbagai edisi (data diolah)



Gambar 2. Persentase Jumlah Pekerja Sektor Informal dan Formal Menurut Status Pekerjaan Utama 1998 – Februari 2007

Sumber: dikutip dari <http://web.bappenas.go.id> dan Statistik Indonesia berbagai edisi (data diolah)

Kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan. Tahun 2006, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 91,95 persen sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan hanya dapat *mengabsorb* tenaga kerja sebanyak 74,86 persen (lihat Gambar 3). Meskipun demikian kemampuan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam menyerap tenaga kerja masih lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di luar sektro pertanian. Hal ini disebabkan sektor informal di kedua jenis lapangan usaha tidak memerlukan modal kerja yang besar dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

### Kekuatan dan Kelemahan Sektor Informal

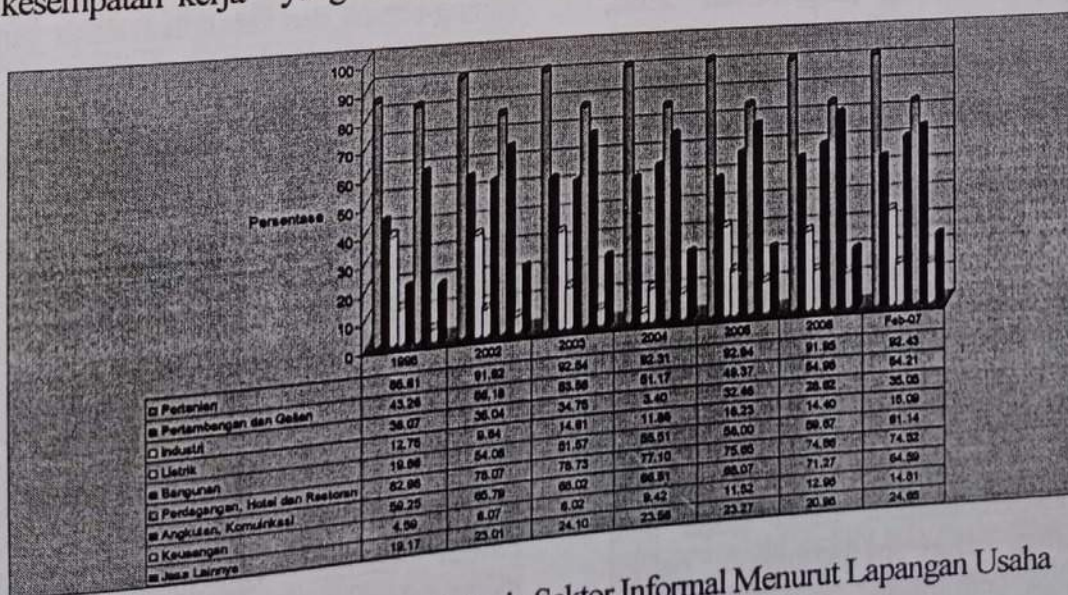
Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa pada awal munculnya sektor informal karena adanya migrasi dari desa ke kota yang dipicu oleh faktor kemiskinan di pedesaan. Kini, faktor kemiskinan bukan lagi satu-satunya pendorong (push factor) untuk melakukan migrasi. Masyarakat semakin proaktif dalam merebut kesempatan kerja yang tersedia di

kota-kota (contoh: banyak para pendatang menyerbu Jakarta dan sebagian besar berusaha di sektor informal).

Di sisi lain, di desa-desa pun terjadi pertumbuhan sektor informal yang cukup pesat. Semakin lancarnya arus informasi dan juga perkembangan desa menjadi kota-kota kecil membuat munculnya berbagai usaha self-employed dan usaha mikro. Sektor informal perdesaan juga menjadi "tujuan" para pencari kerja yang tidak bermigrasi ke kota.

Oleh karena itu, keberadaan sektor informal hendaknya didukung oleh kondisi yang kondusif. Apa dan bagaimana "bentuk" kondisi yang kondusif? Untuk itu analisa akan berangkat dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*) terhadap sektor ini (lihat Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, [www.google.co.id](http://www.google.co.id)).

**Kekuatan** sektor informal adalah tidak memerlukan modal besar, pendidikan tidak harus tinggi karena itu setiap orang dapat membangun usaha dan bersifat padat karya. Kekuatan lainnya adalah ketangguhan sektor ini dalam menghadapi gejolak ekonomi dan



Gambar 3. Persentase Jumlah Pekerja Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha 1998 - Februari 2007

Sumber: dikutip dari <http://web.bappenas.go.id> dan Statistik Indonesia berbagai edisi (data diolah)

menurut Sethuraman seperti yang dikutip Cross (<http://old.openair.org/cross/infdef2.html>) bahwa sektor ini mampu menyerap tenaga kerja ketika kondisi ekonomi menurun.

Sektor ini telah terbukti ketangguhannya, tidak hanya bertahan dalam situasi krisis ekonomi, bahkan berkembang pesat. Daya tahan sektor ini selain disebabkan oleh pekerja yang masuk ke sektor ini demikian banyak, juga disebabkan motivasi pengusaha yang cukup tinggi untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan. Pengusaha di sektor ini sangat adaptif menghadapi perubahan dalam lingkungan usaha mereka.

Kekuatan seperti yang dinyatakan di atas dan diiringi dengan motivasi yang kuat dari pengusaha untuk mempertahankan usahanya membuat mekanisme kerja dalam usaha sektor informal bersifat kekeluargaan dan membangun kerjasama yang kuat

Disamping kekuatan, sektor ini mengandung berbagai **kelemahan**, antara lain: keterbatasan modal khususnya modal kerja, akses terhadap modal lemah, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan-bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia terutama yang berkaitan tentang pengetahuan bisnis, kalah dalam persaingan, dan kurang penguasaan teknologi.

Bagaimanapun ada **peluang** bahwa sektor ini dapat berkembang. Peluang tersebut dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, akibat krisis ekonomi memberi dorongan positif yang merupakan peluang sektor ini untuk berkembang. Seperti: pertumbuhan jumlah unit usaha, pertumbuhan pekerja dan pengusaha yang disebabkan mereka ter-PHK dari sektor-sektor formal, tawaran kerjasama dari sektor formal untuk melakukan mitra usaha atau *subcontracting*. Dari sisi permintaan, bahwa dapat diduga permintaan terhadap produk-produk (barang dan jasa) dari sektor informal tetap besar. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia masih berpendapatan rendah.

Dalam operasionalnya, sektor informal juga menghadapi **ancaman** yaitu persaingan yang semakin bebas dan perkembangan teknologi yang pesat. Sistem pasar bebas ditambah lagi dengan perubahan teknologi dan selera masyarakat akibat pendapatan masyarakat yang terus meningkat, maka setiap pengusaha di sektor informal (manufaktur, perdagangan, dan jasa) ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/menyesuaikan usaha mereka dengan perubahan ini. Misalnya, usaha warung makanan harus memikirkan strategi yang perlu dilakukan agar dapat bersaing dengan makanan cepat saji (fast food).

## PENGALAMAN DI NEGARA LAIN DAN INDONESIA

Sektor informal sangat berkaitan dan mempunyai hubungan kausalitas dengan sektor formal, terutama di perkotaan. Keberadaan sektor informal tidak terlepas dari adanya sektor formal yang memerlukan "jasa" sektor informal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal.

Dengan keterkaitan yang demikian kuat, maka di Nigeria sejak Tahun 1970-an, sektor informal tidak dianggap sebagai sektor yang terpisah dari sektor formal (Nwaka, 2005). Apapun aktifitas sektor ini (*traditional craft* dan *petty trade* yang termasuk dalam sektor subsisten atau *small scale*) sesungguhnya berada dalam lingkup sektor formal. Karena itu beberapa upaya untuk meng-upgrade sektor ini, seperti meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan pekerja yang di bawah standar dilakukan dengan cara mengadakan training, bantuan technical serta bantuan modal.

Kekuatan pekerja yang berada di sektor informal bila disatukan akan menciptakan kekuatan perekonomian yang besar. Sebagai contoh, di Florida, ada 1000 petani yang bekerja

(Cheetah, dalam <http://nubiancheetah.blogspot.com/2007/08/ideas>) memanen jeruk dari sekitar 50 ha luas tanaman untuk dijadikan juice. Untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien dilakukan kerjasama bukan saja menghasilkan jus jeruk tetapi jus apel, jus anggur, jus campuran dibawah bendera Florida's Natural, Growers Pride, Texsun, Bluebird, Donald Duck dan Ruby Red. Kerjasama tersebut cara terbaik untuk melakukan sharing sumber, membangun brand, mempertahankan keberlanjutan pendapatan, dan memperkerjakan jutaan orang dalam ekonomi informal.

Kedua contoh di atas, adalah menyatukan sektor informal dan bekerjasama dengan sektor formal. Contoh berikut, di Afrika terjadi kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor informal, yakni perusahaan susu, sebagai cara untuk tetap eksis dalam usaha. Dengan kerjasama ini bukan saja produk susu yang dihasilkan tetapi juga menghasilkan keju dan produk turunan susu lainnya.

Contoh keberhasilan sektor informal di Indonesia adalah yang terjadi di Purbalingga. Keberadaan sektor informal (Mugiyarto dalam [www.suara-merdeka.com/harian/0511/24/](http://www.suara-merdeka.com/harian/0511/24/)) di daerah ini dimotivasi dan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Perhatian dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk Perda yang memberi kenyamanan dan keberlangsungan usaha mereka. Bentuk bantuan lainnya adalah dalam bentuk pemberian fasilitas yang memadai dengan lingkungan kerja mereka, misalnya: kebersihan, fasilitas umum yang mendukung usaha mereka atau mendorong dan membina terciptanya lembaga lokal seperti koperasi-koperasi yang dapat diakses oleh para pekerja sektor informal.

Berbeda dengan yang terjadi di daerah Purbalingga, pertumbuhan pesat aktifitas sektor informal, khususnya PKL di Kota Bandung membuat pemerintah Kota Bandung mulai berupaya mengatur ruang bagi PKL. Dengan alasan tempat lokasi usaha mengganggu ketertiban dan keindahan kota maka PKL ditatibkan dan dipindahkan. Pemindahan lokasi

dan penertiban menimbulkan kehancuran total karena kalangan pengusaha sektor informal ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan tempat yang baru (Aproudicky, <http://pl.lib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitb-gdl-sl-2003-aproudicky-10>). Dengan demikian kebijakan memindahkan tempat usaha tanpa disertai kebijakan lain akan membuat sektor ini hancur.

Tindakan "mematikan" sektor informal berarti tanpa sadar mengurangi perluasan kesempatan kerja, menghambat pengembangan sumberdaya manusia dan yang paling urgent adalah mengurangi pendapatan negara. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, menguatnya sektor informal karena usaha ini berkembang secara mandiri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang tidak terdiskriminasi oleh gender dan tinggi rendahnya pendidikan. Selain itu, munculnya sektor informal karena manifestasi sistem perekonomian lokal dimana permintaan konsumen (Mugiyarto dalam [www.suaramerdeka.com/harian/0511/24/ban02.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/24/ban02.htm)) cenderung selalu kuat karena barang dan jasa yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, mematikan sektor informal merupakan sikap yang tanpa sadar akan menambah angka pengangguran.

*Kedua*, sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Karena itu, sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin yang biasanya terkait dengan sektor informal.

*Ketiga*, modal yang digunakan sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal; dan dengan modal yang relatif sedikit mampu memperkerjakan orang. Sektor ini juga memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia dengan



cara menyediakan akses pelatihan dan ketrampilan.

*Keempat*, sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran.

*Kelima*, mematikan sektor informal berarti mengurangi pendapatan negara. Studi Charners ([www.google.co.id](http://www.google.co.id)) di beberapa negara menunjukkan kontribusi sektor informal terhadap GDP demikian besar. Di Sub Sahara Afrika, kontribusi sektor informal terhadap GDP, termasuk sektor informal Pertanian 55% dan tanpa Pertanian 24%. Di Latin Amerika: 30,6% dengan pertanian dan 23,4% tanpa pertanian. Di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 sebesar 55,8 persen dan terhadap total ekspor sebesar 19 persen (Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, [www.google.co.id](http://www.google.co.id)).

## AGENDA KE DEPAN

Ada beberapa agenda yang perlu dilakukan agar keberlangsungan sektor ini tetap terjamin. Agenda tersebut adalah sebagai berikut:

**Modal.** Umumnya, pekerja sektor informal memperoleh pendapatan yang lebih kecil dari pekerja sektor formal. Karena itu, perlu bantuan modal yang dapat diperoleh dari pemerintah kota/daerah, koperasi, institusi atau NGO. Peranan kelompok-kelompok penolong (*self-help groups*) ini diperlukan. Dengan bantuan modal maka diharapkan terjadi penguatan kemampuan terutama kemampuan modal kerja. Pembentukan modal dapat pula dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pengusaha-pengusaha sektor informal sendiri ataupun lewat sistem kemitraan antara pengusaha sektor formal dan informal. Seperti yang dilakukan PUSRI dalam *mengayomi* usaha kelempang-kerupuk di daerah Seberang Ulu Kota Palembang. Pola seperti ini dengan

memberikan modal usaha dalam bentuk kemitraan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Ini terlihat dari perkembangan usaha kerupuk kempelang yang semakin maju.

**Kondisi Kerja.** Perbaikan kondisi kerja menjadi perhatian utama, sebab ada keterkaitan yang erat antara kondisi kerja dan kenaikan produktivitas. Di Asia, sebagian besar dari *homeworkers* adalah wanita ([www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf\\_sect.htm](http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf_sect.htm)), mereka menghasilkan asesoris, baju/jilbab, boneka dan handicrafts. Sebagai pekerja sendiri (*self-employed*) atau pekerja sub-kontrak, mereka dieksploitasi dan dimelaratkan (*impoverished*) dan umumnya mereka bekerja di tempat yang tidak sehat yang tentu saja mengganggu kesehatannya dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesehatan anaknya. Dengan tempat kerja tidak sehat dan pendapatan yang rendah maka sulit diharapkan mereka akan menjadi *permanent worker*. Kondisi kerja (lingkungan kerja) yang baik adalah faktor yang dapat membuat sektor ini tumbuhkembang. Program-program yang efektif antara pengusaha dan pekerja harus dijadikan prioritas. Pekerja wanita, dan pekerja anak menjadi target dalam perbaikan kondisi kerja. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur dan pelayanan sebagai strategi yang secara simultan dapat memperbaiki kondisi kerja dan produktivitas.

**Ancaman ketertinggalan teknologi.** Hal ini dapat diatasi jika terjalin kerjasama yang kuat antara usaha sektor informal sendiri (antara usaha mikro dan usaha sendiri) dan juga antara sektor informal dan sektor formal. Contoh yang dapat dikemukakan pada usaha perternakan ayam, segala keperluan teknologi disalurkan oleh rekan mitra mereka.

**Perlindungan Sosial (*social protection*).** Pekerja di sektor informal adalah orang-orang yang memerlukan perlindungan. Sektor ini memerlukan biaya untuk proteksi. Inisiatif lokal diperlukan untuk memberi support dan perlindungan. Organisasi pengusaha dan organisai pekerja mempunyai kapasitas untuk

memberikan perlindungan sosial. Organisasi-organisasi ini juga dapat mendorong terjadinya keterkaitan antara sektor formal dan informal. Mereka juga dapat membantu dalam pembangunan entrepreneurship.

**Peranan Pemerintah Kota dan Daerah.** Pemerintah Kota dan Daerah perlu memahami problem yang dihadapi sektor informal dan dengan pemahaman tersebut akan dicari solusi untuk mendorong perubahan dalam sektor informal. Antara lain mengembangkan program-program pelatihan yang dapat *mensupport* sektor informal. Dengan penguatan kemampuan, mereka dapat juga membantu mengimplementasikan program-program sektor informal.

**Mengintegrasikan program sektor informal dan program peningkatan kesempatan kerja.** Karena keberadaan sektor informal adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran maka pemerintah kota dan daerah perlu memfasilitasi dengan penetapan Perda yang dapat memberi kenyamanan dan keberlangsungan usaha. Selain itu, pemerintah kota dan daerah dapat memberikan kemudahan memperoleh modal dari bank-bank pemerintah kota dan daerah. Fasilitas lainnya adalah mendorong agar lembaga lokal seperti koperasi-koperasi dapat membantu usaha sektor informal.

**Kemitraan antara sektor formal dan informal hendaknya pada "level yang sejajar".** Dalam arti sektor informal bukan perpanjangan tangan atau agen dari sektor formal. Sebagai mitra, sektor informal hendaknya memperoleh informasi yang jelas tentang pasar dan harga.

**Terakhir, diperlukan jalinan kerjasama secara reguler untuk sharing terhadap informasi sektor informal.** Ini sangat potensial untuk belajar dari pengalaman dari unit usaha yang berhasil untuk dijadikan *pioneer* dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan ditempat lain dapat pula dilakukan dilakukan ditempat sendiri.

## KESIMPULAN

*Pertama*, keberadaan sektor informal tetap harus di support. Segala akibat negatif yang ditimbulkan sektor ini, seperti kesemerawutan, bukan menjadi dasar untuk memindahkan tempat usaha sektor ini ke tempat lain. Sebab akan membuat sektor ini lumpuh. Padahal sektor informal telah menunjukkan ketangguhan dimana sektor ini tetap eksis meskipun kondisi ekonomi yang menurun.

*Kedua*, kemampuan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja adalah dua kali lebih besar dari sektor formal. Hal ini tidak terlepas dari motivasi pengusaha di sektor ini yang sangat adaptif dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis.

*Ketiga*, keterbatasan modal dapat diatasi dengan melakukan kerjasama antar pengusaha-pengusaha sektor informal; atau melakukan kerjasama kemitraan dengan pengusaha sektor formal. Selain itu dapat diatasi dengan melakukan kerjasama baik dengan pemerintah, koperasi, institusi-institusi dan dengan NGO.

*Keempat*, dampak dari jalinan kerjasama dengan berbagai pihak seperti tersebut di atas dapat mengatasi ancaman ketertinggalan teknologi, dapat membantu pembangunan *entrepreneurship*, mengembangkan program-program pelatihan yang dapat mendukung sektor informal.

*Kelima*, pengintegrasian program sektor informal dan program peningkatan kesempatan kerja dengan cara menetapkan PERDA yang dapat memberikan kenyamanan dan keberlangsungan usaha. Sharing informasi dari sektor informal ditempat lain adalah juga merupakan agenda, sebab sangat potensial untuk memperbaiki dan belajar dari keberhasilan sektor tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aproudicky, Dian Sulu. *Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandung, Studi Kasus Simpang Dago*. <http://pl.lib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbgdlsl-2003-aproudicky-10>.
- BPS. Statistik Indonesia, berbagai edisi, Jakarta.
- BPS. 2007. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Jakarta (Februari).
- Charmers, Jacques. *Measurement of the Contribution of Informal Sector/Informal Employment to GDP in Developing Countries: Some Conceptual and Methodology Issues*. [www.google.co.id](http://www.google.co.id). Diakses 19 November 2007.
- Cheetah, Nubian. *Ideas to Grow the Informal Sector in Africa*. <http://nubiancheetah.blogspot.com/2007/08/ideas>. Diakses 15 November 2007.
- Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi. *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan*. [www.google.co.id](http://www.google.co.id), diakses 19 November 2007.
- [http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf\\_sect.htm](http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/feature/inf_sect.htm). The Informal Sector. Diakses 15 November 2007
- <http://web.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/StudiPekerjaAcc.pdf>, diakses 3 Nopember 2007
- Mugiyarto. *Geliat Sektor Informal Purbalingga*. [www.suaramerdeka.com/harian/0511/](http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/). Diakses 16 November 2007.
- Nwaka, Geoffrey I. 2005. "The Urban Informal Sector in Nigeria: Towards Economic Development, Environmental Health, and Social Harmony". Dalam *Global Urban Development Magazine*, 1 (1). [www.globalurban.org/ssue1PIMag05/NWAKA.htm](http://www.globalurban.org/ssue1PIMag05/NWAKA.htm).
- Widodo, Tri. "Peran Sektor Informal Terhadap Perekonomian Daerah: Teori Dan Aplikasi". Dalam [Http://paue.ugm.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=55&itemid=2](http://paue.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=55&itemid=2), Diakses tanggal 7 Desember 2007